

410

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI PASIFIK BARAT

Endi RUKMO*

Dalam situasi kawasan yang sedang berubah ditinjau dari sudut politik, ekonomi dan militer, kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di kawasan Pasifik Barat tampaknya secara prinsip tidak berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya yaitu kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk menghadapi ancaman dari musuh global utamanya Uni Soviet. Dengan perkataan lain kebijakan luar negeri AS di kawasan ini merupakan usaha negara itu untuk mempertahankan kepentingan dunia bebas dari ancaman ofensif ideologi komunisme. Namun perkembangan pada waktu akhir-akhir ini tampaknya melibatkan AS ke dalam suatu dilema yang terkadang sulit dicari pemecahannya. Sebagai contoh, normalisasi hubungan dengan RRC. Di satu pihak secara strategis militer peningkatan hubungan baik kedua negara itu sangat dibutuhkan dalam menghadapi musuh bersama Uni Soviet. Tetapi di lain pihak peningkatan hubungan itu perlu dibatasi mengingat bahwa RRC masih tetap menganut paham komunisme yang masih tetap ditentang oleh kebanyakan rakyat AS. Oleh karenanya dalam hal ini kebijakan luar negeri AS terhadap RRC itu tidak jarang mendapat tentangan dari rakyat (tercermin di dalam Kongres AS). Dilema itu tampak dari usaha Pemerintah AS dalam menangani masalah Taiwan yang merupakan hambatan utama peningkatan hubungan dengan RRC.

Dari pernyataan-pernyataan para pejabat dan pengamat politik internasional AS suatu pembenaran bahwa politik luar negeri AS di Pasifik, khususnya di Pasifik Barat, lebih difokuskan pada usaha mencari dukungan dalam rangka menghadapi ancaman militer dari Uni Soviet agak diperjelas. Misalnya, dalam pidato yang disiapkan untuk dibacakan pada Sub-komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS tentang Asia Timur dan Pasifik yang memulai se-

rangkain dengan pendapat mengenai kebijakan dan program AS di Asia Tenggara, Richard L. Armitage, Wakil Menteri Pertahanan Urusan Asia Timur dan Pasifik mengatakan pada 8 Juni 1982 bahwa: (1) Uni Soviet tampaknya percaya bahwa suatu negara harus ditata kembali menurut citra Uni Soviet jika hendak dijadikan sahabatnya yang dapat dipercaya dan negara-negara lainnya harus diintimidasi dengan kekuatan militer; (2) kebijakan AS mendukung kebebasan, memperkuat kemampuan dan kepercayaan sekutu-sekutu dan sahabat-sahabat untuk melawan intimidasi, dan bertindak sendiri tanpa memerlukan restu dari AS; (3) kehadiran kekuatan militer AS di Pasifik Barat mengandung penegasan kembali bahwa AS dapat membantu sahabat-sahabat dalam menghadapi ancaman luar yang tidak dapat mereka tanggulangi sendiri.¹

Ada beberapa arti yang tersirat dalam pernyataan Armitage di atas itu. Pertama, AS tetap cemas dengan ancaman Uni Soviet yang ingin mengubah sistem yang berlaku di blok bebas. Perlu diketahui bahwa sejak dekade pertama sesudah Perang Dunia Kedua, sejumlah besar negara baik non-Barat maupun Barat telah bergabung di bawah pimpinan AS. Persekutuan yang mempunyai tujuan sama, yaitu persekutuan "*Dunia Bebas*" atau negara-negara demokratis untuk menghadapi komunisme.

Ancaman Uni Soviet itu lebih mencemaskan lagi dengan adanya intimidasi negara itu dengan kekuatan militer. Memang di bagian lain Armitage mengatakan bahwa sejak tahun 1978 Uni Soviet mulai menggunakan kapal-kapal laut dan pesawat terbang mereka di pangkalan sepanjang Pantai Vietnam, seiring dengan perkembangan menyolok kekuatan angkatan laut dan penerbangan laut Uni Soviet di seluruh kawasan Pasifik. Dikatakannya bahwa Uni Soviet menempatkan peluru kendali SS-20 di kawasan Timur Jauh Uni Soviet, sehingga semakin mengancam kawasan itu dan tiada tanda-tanda bahwa ancaman itu akan berkurang.² Ancaman militer Uni Soviet yang terus meningkat itu juga diakui oleh seorang ahli politik internasional, khususnya untuk kawasan Asia dan Pasifik. Dalam artikelnya yang dimuat di dalam *Survival* bulan Juli/Agustus 1982, ia mengatakan bahwa di dalam banyak bidang strategi yang mendasar, perimbangan kekuatan antara AS dan Uni Soviet telah berubah. AS sudah tidak mengungguli Uni Soviet lagi dalam banyak hal. Sementara itu meningkatnya kemampuan kekuatan militer Uni Soviet di Pasifik Barat adalah: (1) karena bertambah buruknya hubungan antara Uni Soviet dan Jepang maupun RRC yang keduanya merupakan negara-negara besar di kawasan itu; (2) karena perkembangan baru komitmen Uni Soviet kepada Im-

¹Lihat "Armitage: Kepentingan Keamanan AS di Asia Tenggara," yang dimuat dalam

perium Vietnam yang telah muncul di kawasan Asia Tenggara. Oleh karenanya dari pandangan strategi AS, faktor kekuatan militer Uni Soviet yang secara mantap terus ditingkatkan di kawasan itu tidak dapat diabaikan.¹ Perkembangan kekuatan militer Uni Soviet memang tidak terlepas dari strategi globalnya, terutama karena adanya kesempatan sehubungan dengan detente. Tampaknya hal itu disadari oleh Pemerintah Reagan.

Memang pada dekade 1970-an AS menganut suatu politik luar negeri yang berusaha membawa kedua belah pihak ke dialog untuk meredakan ketegangan dan memperkecil risiko pecahnya peperangan. Sebagai hasilnya: tiada peperangan, tetapi usaha AS untuk mengekang diri secara sepihak tidak diimbangi oleh Uni Soviet. Negara itu tidak mengubah sasaran-sasarannya secara mendasar, tetapi meneruskan usahanya untuk memperluas pengaruhnya di kawasan-kawasan yang semakin dekat dengan kepentingan-kepentingan Barat, dan AS menderita kerugian-kerugian karena mengabaikan hal itu. Sehubungan dengan itu Reagan menjanjikan bahwa AS akan kembali menganut suatu politik yang tegas terhadap Uni Soviet, suatu politik pembalasan yang saksama (*strict reciprocity*), di mana AS menegaskan mempunyai sarana-sarana untuk melindungi kepentingan-kepentingannya dan kemauan untuk menggunakannya, suatu politik yang menyambut baik usaha pengendalian senjata tetapi tidak akan memberikan konsesi secara sepihak.² Jadi singkatnya, detente yang telah berjalan selama ini lebih menguntungkan pihak Uni Soviet, sehingga ia berhasil memperluas pengaruhnya yang menurut Pemerintah AS sangat membahayakan kepentingan-kepentingan Dunia Bebas.

Arti kedua pernyataan Armitage di atas adalah bahwa AS sadar akan keterbatasan-keterbatasan kemampuannya, dan karenanya selalu mendukung kebebasan bagi sekutu-sekutu dan sahabat-sahabatnya untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri guna melawan intimidasi serta mendukung kebebasan untuk bertindak sendiri tanpa memerlukan restu dari AS. Dari pernyataan itu tercermin keinginan AS untuk melepaskan peranannya sebagai polisi dunia seperti dimainkannya pada dekade pertama dan kedua setelah Perang Dunia Kedua. Oleh karenanya AS mendesak Pemerintah Jepang, misalnya, untuk meningkatkan anggaran pertahanannya. Demikian pula AS berangsur-angsur menarik pasukannya dari Korea Selatan.

Meskipun demikian AS masih terikat komitmen bantuannya kepada sahabat-sahabatnya di kawasan Pasifik, terutama guna menghadapi ancaman luar yang tidak dapat mereka tanggulangi sendiri. Hal itu ditegaskan pula oleh

¹Robert A. Scalapino, "The US and East Asia: Views and Policies in a Changing Era," *Survival*, Juli/Agustus 1982, hal. 147.

Armitage dalam pernyataannya di atas. Jadi pada pokoknya AS bermaksud mempertahankan kehadirannya di kawasan Pasifik Barat, termasuk kehadiran militernya yang sepadan sehingga komitmennya itu dapat diandalkan, penekanan kehadiran militer AS itu akan terletak pada persenjataan strategi, kekuatan udara dan kekuatan laut. Sementara itu instalasi-instalasi militer AS di daratan negara-negara setempat tidak akan diperluas dan justru ada kecenderungan akan diperkecil.

Perubahan komitmen militer AS itu terjadi karena adanya perubahan-perubahan di kawasan dan hambatan-hambatan internal di AS. Perubahan-perubahan yang terjadi di RRC bisa dijadikan suatu contoh. Munculnya kelompok yang berpandangan pragmatis dan moderat di RRC memungkinkan negara itu mempererat hubungannya dengan negara-negara Barat khususnya AS dan Jepang. Meskipun suatu entente militer antara RRC, Jepang dan AS belum menjadi suatu kenyataan, kecenderungan ke arah kerja sama semacam itu sudah tampak. Cara Pemerintah Reagan berusaha mengatasi masalah Taiwan dengan pihak Beijing baru-baru ini kiranya mengungkapkan bahwa AS tidak mau kehilangan RRC. Dan usaha itu ternyata mendapat dukungan yang kuat dari Jepang. Jadi rupanya ketiga negara besar itu memang mempunyai kepentingan militer yang paralel, khususnya untuk menghadapi ancaman dari Uni Soviet. Sementara itu rupanya rakyat dan Pemerintah AS sadar bahwa biaya yang ditanggung oleh karena peranannya sebagai polisi dunia itu semakin membebani dirinya, maka ia terus mendesak negara-negara setempat untuk menanggung bersama biaya pertahanan yang cukup besar itu.

Secara politis ada kecenderungan-kecenderungan baru yang sedang terjadi di kawasan Asia-Pasifik. Dalam hal ini pengamatan Profesor Scalapino di dalam artikelnya seperti disebutkan di atas sungguh tepat. Dikatakannya bahwa pada waktu-waktu yang lalu dasar kuat persekutuan di "Dunia Bebas" dan kepercayaan rakyat AS mengenai politik luar negeri yang didasari oleh *moral* mendukung komitmen AS selama masa awal sesudah Perang Dunia Kedua. Namun sekarang ini telah terjadi suatu perubahan besar di dalam politik global, yaitu pergeseran dari apa yang dinamakan "aliansi" menjadi "alignment," di mana persahabatan, yang dapat berjalan baik di waktu-waktu yang lalu, menjadi tidak intensif lagi. Komitmen pihak yang kuat menjadi lebih fleksibel dan kurang jelas, kewajiban dari pihak yang lemah kurang terikat. Sekarang ini pihak-pihak yang lemah lebih bebas menentukan sikap dan tindakan.¹ Hal ini tercermin juga dalam pernyataan Armitage bahwa AS sekarang ini mendukung kebebasan untuk bertindak sendiri tanpa memerlukan restu.

Sekutu-sekutu dekat AS di kawasan ini yang dapat dijadikan contoh adalah Thailand dan Pilipina. Dengan kedua negara itu AS telah memperbaharui perjanjian pertahanan bersamanya, dan di Thailand AS justru menarik kembali semua kehadiran militernya dan di dalam perjanjian pertahanan yang baru dengan negara itu AS hanya meminta agar ia tetap diperbolehkan menggunakan fasilitas-fasilitas militer yang ada. Demikian pula dengan Pilipina AS telah memperbaharui perjanjian pertahanan bersamanya, yang antara lain menyangkut pangkalan-pangkalan militer di Teluk Subic dan Clark. Di dalam perjanjian yang baru itu bendera Pilipina dibolehkan berkibar di samping bendera AS dan komando pangkalan-pangkalan militer itu harus dipegang oleh perwira militer Pilipina.¹ Dengan kata lain, dalam perjanjian yang baru itu AS harus menghormati kedaulatan Pilipina.

Meskipun telah terjadi perubahan-perubahan itu, rupanya AS tetap menghendaki hubungan militer yang erat dengan kedua negara tersebut di atas, mengingat makin meningkatnya ancaman militer Uni Soviet terhadap baik kepentingan nasional AS sendiri maupun kepentingan negara-negara sahabatnya di kawasan Pasifik Barat. Misalnya pada awal Juni tahun ini diselenggarakan suatu latihan bersama yang diberi nama "Operation Gold" antara satuan-satuan Angkatan Laut dan marinir AS dan satuan-satuan serupa dari Angkatan Bersenjata Thailand di Teluk Siam.

Sementara itu pidato Armitage mengungkapkan kepada kita bahwa di mata AS Pilipina merupakan sahabat yang vital secara strategis, pertama karena Pilipina terletak di tengah antara kawasan sumber daya militer AS di Pasifik dan Asia Barat Daya yang kaya minyak, dan kedua karena pangkalan Angkatan Laut AS di Teluk Subic dan pangkalan udara di Clark memberikan posisi terdepan, tempat AS dapat melancarkan serangan balasan. Jadi negara-negara yang pada waktu-waktu yang lalu menjadi sekutu-sekutunya tetap diharapkan untuk bersama-sama dengan AS bergabung dalam satu alignment.

Perubahan pandangan AS dalam menentukan kebijakan luar negerinya itu rupanya adalah akibat adanya kendala-kendala di dalam negeri. Di samping akibat resesi perekonomian yang melanda dunia sekarang ini, peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi belakangan ini juga mempunyai pengaruh yang tidak kecil. Contohnya adalah trauma atas kekalahan AS dalam Perang Vietnam, meskipun hal ini sedikit demi sedikit telah mulai dapat diatasi. Sebagai akibat dari perkembangan itu, timbul perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan luas rakyat AS mengenai politik luar negeri AS. Di dalam salah satu badan politik AS, misalnya terdapat suatu harapan nyata untuk mengkonsentrasikan diri pada isyu-isyu dalam negeri, karena ia berpendapat bahwa banyak

masalah luar negeri terlalu sulit untuk ditangani oleh suatu kekuatan mana pun bahkan bila beberapa kekuatan bergabung.¹ Sementara itu kelompok-kelompok anti perang (pacifist group) yang tidak saja bermunculan di hampir semua negara Eropa Barat tetapi juga telah melanda AS mulai mendapat perhatian di kalangan pengambil keputusan AS.

Yang menjadi pertanyaan di sini adalah sejauh mana Pemerintah Reagan dapat menyesuaikan kebijakan luar negerinya di kawasan Pasifik Barat dengan perkembangan yang terjadi. Kiranya perlu dicatat di sini pendapat Profesor Scalapino bahwa sasaran politik AS yang luas di kawasan Asia-Pasifik dewasa ini adalah memperkuat ikatan ekonomi dan politik dengan bangsa-bangsa setempat, dan membawa mereka kepada hubungan yang lebih positif.² Bila kita tinjau lebih lanjut mengenai kebijakan luar negeri AS terhadap negara-negara kunci di kawasan ini, maka tampak suatu generalisasi hubungan-hubungan tersebut.

Hubungan antara AS dan Jepang, misalnya, dianggap vital untuk stabilitas di kawasan Asia-Pasifik, tetapi hubungan itu tidak dapat dijamin, khususnya sejak perhatian serius akan hubungan itu berkembang di AS sehubungan dengan kebijakan perdagangan dan pertahanan Jepang. Di bidang ekonomi, politik dan keamanan, ikatan AS-Jepang sedang menuju kepada suatu titik yang kritis. Di dalam bidang ekonomi misalnya, AS menghendaki agar Jepang bekerja sama dalam mengatasi berbagai macam hambatan non-tarif, termasuk peraturan-peraturan pemerintah, yang dewasa ini mempersulit jalan masuk (access) ke pasaran Jepang. Di bidang keamanan, AS pada dasarnya mengharapkan adanya tiga perkembangan. *Pertama*, kerja sama AS-Jepang yang erat dan kontinyu baik dalam rencana maupun dalam latihan bersama memperhitungkan kebutuhan yang potensial untuk pasukan AS di kawasan lain dalam waktu darurat, dengan konsekuensi pengembangan pasukan pertahanan konvensional Jepang yang modern yang mampu memperhitungkan operasi pertahanan dengan lingkup yang lebih luas. *Kedua*, perluasan pengintaian atas rute udara dan air di Pasifik Barat. *Ketiga*, partisipasi Jepang dalam perundingan informal dengan negara-negara tetangganya. AS sadar akan adanya hambatan kesanggupan Jepang untuk menerima tanggung jawab itu. Ia tidak ingin negara itu mengembangkan persenjataan nuklir tetapi merasa bahwa Jepang dapat dan seharusnya menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan pertahanan di kawasan Pasifik Barat, karena hal itu merupakan kepentingannya juga dan usaha ini dapat dilakukan tanpa mengadakan perubahan konstitusi.

Dalam bidang politik, AS menyadari bahwa di Jepang masih terdapat suatu sentimen yang kuat untuk suatu "diplomasi menjaga jarak" (equidistant diplomacy). Menurut banyak kalangan di Jepang kebijakan luar negeri semacam ini akan lebih menguntungkan ditinjau dari hubungan ekonomi. Tetapi AS tetap berharap agar Jepang sadar akan ancaman dari Uni Soviet.¹ Apakah harapan itu akan terkabul tergantung pada perubahan persepsi mengenai besar kecilnya ancaman Uni Soviet itu atas Jepang. Hingga akhir tahun 1980-an banyak orang Jepang masih menganggap bahwa peningkatan penempatan satuan-satuan militer Uni Soviet di kawasan itu bukan ditujukan kepada Jepang, melainkan dimaksudkan untuk menghadapi ancaman militer dari RRC dan AS.² Tetapi sejak intervensi militer Uni Soviet di Afghanistan, tampaknya anggapan itu mulai berubah. Sebagai contoh, keinginan Jepang untuk mengikuti AS dalam mengenakan sanksi-sanksi pada Uni Soviet menunjukkan kepada kita bahwa Jepang mulai sadar bahwa Uni Soviet memang merupakan suatu ancaman yang potensial, lebih-lebih mengingat persengketaan teritorial antara kedua negara itu.

Ketika Ronald Reagan terpilih menjadi Presiden AS, banyak orang Jepang, khususnya kaum intelektualnya, lebih bersimpati dengan Partai Demokrat. Tetapi ternyata bahwa Pemerintah Tokyo tetap berhasrat melanjutkan kerja sama yang erat dengan Washington. Di dalam komunikasi bersama PM Zenko Suzuki dan Presiden Reagan di Washington tanggal 8 Mei 1981, misalnya, Suzuki mengatakan bahwa persekutuan antara Jepang dan AS dibangun untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Kemudian mengenai pembagian peranan pertahanan ia juga mengatakan bahwa Jepang akan meningkatkan usahanya untuk membangun kemampuan pertahanannya, khususnya di wilayah Jepang sendiri dan sekitarnya. Pernyataan ini lebih ia perinci dalam konferensi pers yang diadakan kemudian dengan mengatakan bahwa Jepang akan memperkuat kemampuan pertahanannya agar dapat melindungi laut teritorialnya dan jalur lautnya sampai jarak 1.000 mil.³

Sementara itu Pemerintah AS mengalami suatu dilema yang sulit untuk dipecahkan dalam hubungannya dengan Korea Selatan. Di satu pihak AS sangat membutuhkan negara ini karena letaknya yang strategis ditinjau secara militer, terutama dalam usahanya untuk menghadapi Uni Soviet di kawasan. Oleh karenanya rencana penarikan pasukan AS yang telah direncanakan oleh Pemerintah Carter pada akhirnya ditunda. Tetapi di lain pihak banyak ter-

¹*Ibid.*, hal. 151.

²Hiroshi Kimura, "Failure of Soviet Policies toward Japan," di dalam *Asia-Pacific Communi-*

dapat perbedaan di kalangan masyarakat AS yang secara historis menekankan dasar moral politik luar negeri dan penyelamatan dunia demokrasi. Kelompok yang satu yang sering disebut "Kelompok Liberal Kiri" secara tajam mengkritik "kediktatoran sayap kanan." Kelompok yang lain, yang lebih dekat dengan kelompok tengah masyarakat AS yang secara historis liberal, mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah Carter dan mengkritik dan bahkan ingin menghukum mereka yang memperkosa hak-hak asasi manusia. Tetapi kebijakan semacam itu telah gagal karena ketidakmampuan Pemerintah Carter untuk tetap konsisten. Menurut Profesor Scalapino, sikap kelompok moderat/konservatif mulai mendominasi sikap-sikap masyarakat yang lain. Hal itu terungkap dari pandangan Pemerintah Reagan bahwa AS memikirkan hak-hak asasi manusia dan akan berusaha sekuat tenaga bersama-sama dengan negara-negara sahabat untuk meningkatkan kebebasan dan membasmi kesewenang-wenangan. Tetapi ia tetap menerima sikap bangsa-bangsa yang tidak mau melaksanakan sistem demokrasi ala Barat, karena AS tidak mau melihat bangsa-bangsa itu jatuh lebih dalam pada bentuk otoriter yang lebih gawat. Berdasarkan pengalaman sejarah yang baru saja terjadi, keadaan rakyat Vietnam Selatan, Kamboja dan Laos baik secara politis maupun ekonomis ternyata lebih baik di masa pemerintahan Thieu, Lon Nol dan Souvanaphouma. Demikian pula situasi politik di Iran.¹ Jadi rupanya kebijakan luar negeri AS terhadap Korea Selatan itu lebih realistis.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Sikap realistis Pemerintah Reagan ini tercermin pula pada usahanya mengatasi masalah yang menghambat hubungannya dengan RRC. Di dalam Komunike yang secara bersama-sama diumumkan di Washington dan Beijing pada tanggal 17 Agustus 1982, ditegaskan bahwa Reagan tidak mengabaikan pihak RRC dan tidak mendukung sepenuhnya pihak Taiwan karena sadar bahwa RRC dapat dimanfaatkan untuk menghadapi Uni Soviet di Asia. Tidak seperti dukungannya kepada Korea Selatan tentang penyatuannya kembali dengan Korea Utara, di mana AS berdiri sepenuhnya di belakang Korea Selatan, dalam hal penyatuan kembali Beijing dan Taiwan, rupanya AS ingin berdiri di tengah-tengah. Meskipun demikian AS tidak menghendaki adanya penyatuan yang dipaksakan. Tetapi bagaimana caranya agar kedua belah pihak menerima persyaratan mengenai penyatuan kembali itu masih merupakan tanda tanya besar.

Dalam hubungan dengan negara-negara ASEAN, AS tampaknya sampai saat ini tetap konsisten. Itikad baik Pemerintah AS telah ditunjukkan kepada negara-negara ASEAN. Dukungannya kepada ASEAN dalam usahanya untuk menyelesaikan masalah Kamboja kiranya perlu disambut baik. Di bidang hubungan ekonomi, AS mengakui bahwa ASEAN sebagai kelompok merupa-

kan partner dagang terbesarnya yang kelima. Jadi peningkatan hubungan dengan negara-negara ASEAN itu memang vital bagi kepentingan AS sendiri, tidak saja dari segi strategi militer globalnya, tetapi juga dari segi ekonomi dan ideologi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut. *Pertama*, kekalahan AS di Vietnam tahun 1975 telah membuat negara ini mempertimbangkan lagi manfaat kehadiran militernya di kawasan Asia-Pasifik. Hal itu tercermin dari keputusan Pemerintah Carter untuk membongkar pangkalan militernya di Thailand pada tahun 1976 dan untuk menarik pasukan angkatan daratnya dari Korea Selatan pada tahun ini (1982). Tetapi kebijakan Pemerintah Carter ini mulai berubah pada masa-masa akhir pemerintahannya terutama karena adanya realita ancaman Uni Soviet yang semakin meningkat. Di masa itu Uni Soviet berhasil mendapatkan akses ke pangkalan militer di Vietnam dan kemudian mengadakan intervensi militer ke Afghanistan. Kebijakan Carter ini mendapat kritikan tajam di dalam negeri dan menurunkan kredibilitas AS di kawasan ini. *Kedua*, terpilihnya Reagan sebagai Presiden AS sekarang ini tampaknya memberikan semangat baru kepada negara-negara di kawasan, terutama karena tekadnya untuk mengembalikan kredibilitas dan komitmen kehadiran militer AS di kawasan, meskipun disadari bahwa situasinya telah berubah. Pandangan realistik Reagan yang mendasari kebijakan luar negeri pemerintahnya itu diharapkan dapat menciptakan suasana damai di kawasan. Memang Reagan harus membereskan perekonomian dalam negeri, tetapi hubungan ekonomi yang kurang baik dengan negara-negara di kawasan justru akan menghambat usaha tersebut.

Ketiga, ancaman dari Uni Soviet selalu menjadi pertimbangan pokok dalam kebijakan luar negeri AS di kawasan ini, sehingga persepsi-persepsi ancaman negara-negara setempat yang lain sering kurang mendapat perhatian. Negara-negara ASEAN, misalnya, sebagai negara-negara berkembang melihat bahwa ancaman terbesar datang dari dalam negeri sendiri, atau karena pengalaman sejarah negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia juga melihat RRC sebagai ancaman yang cukup potensial di masa-masa mendatang. Di samping itu dasar pandangan kebijakan luar negeri negara-negara yang menganut paham non-alignment seperti Indonesia dan Malaysia perlu mendapatkan perhatian dari AS. Jadi dasar pandangan yang berbeda ini janganlah menjadi hambatan bagi peningkatan hubungan antara pihak-pihak yang bersangkutan, karena tujuan hubungan yang baik antara negara yang satu dengan lainnya adalah ikut mewujudkan situasi yang aman dan damai.